

## **Jurnal Of Development Economic and Digitalization**

Vol. 3, No. 2, 2024, pp. 1-20  
P-ISSN 2963-6221 – E-ISSN 2962-8520

### **ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENYERAPAN TENAGA KERJA DI 10 PROVINSI PULAU SUMATERA TAHUN 2010-2022**

Cinta Anindita Aji<sup>1\*</sup>, M.B Nani Ariani<sup>2</sup>

<sup>1</sup>cintandtaji@gmail.com, <sup>2</sup>nani.ariani@upnvj.ac.id

<sup>1</sup>Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, <sup>2</sup>Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

\*Penulis Korespondensi

---

Received: 1 Agustus 2024

Published: 31 Agustus 2024

#### **Abstrak**

Satu diantara 5 Pulau terbesar di Indonesia yaitu Pulau Sumatera memiliki besaran jumlah angkatan kerja terbanyak dengan potensi SDA serta kemampuan pertumbuhan ekonomi yang baik, namun belum optimal dalam menyerap tenaga kerja dikarenakan adanya beberapa fenomena yang terjadi, termasuk kebijakan yang belum maksimal dikembangkan di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk dapat melihat adanya dampak antara variabel Tingkat Pendidikan (TP), Upah Minimum Regional (UMR), Investasi (INV), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan Jumlah Unit Usaha (JUJ) terhadap Penyerapan Tenaga Kerja (PTK) di 10 Provinsi Pulau Sumatera. Dalam penelitian terdapat 130 sampel dengan jenis data sekunder yang diambil melalui BPS. Teknik analisis yang digunakan ialah regresi data panel yang diolah dengan Stata 17 dengan model terbaiknya adalah FEM dan dikembangkan menggunakan model FGLS dikarenakan adanya permasalahan asumsi klasik. Hasil penelitian menjelaskan bahwa TP dan Investasi berpengaruh signifikan positif terhadap PTK, UMR tidak berpengaruh signifikan dan negatif terhadap PTK, serta PDRB dan JUJ berpengaruh signifikan dan negatif terhadap PTK. Adapun secara simultan menunjukkan bahwa TP, UMR, INV, PDRB, dan JUJ berpengaruh signifikan terhadap PTK.

**Kata Kunci:** Tenaga Kerja; Pendidikan; Upah; Investasi; PDRB; Usaha.

**Abstract**

*One of the 5 largest islands in Indonesia, namely Sumatra Island, has the largest workforce with natural resource potential and good economic growth capabilities, but is not yet optimal in absorbing labor due to several phenomena that occur, including policies that have not been optimally developed in Indonesia. The aim of this research is to see the impact of the variables Educational Level (TP), Regional Minimum Wage (UMR), Investment (INV), Gross Regional Domestic Product (GRDP), and Number of Business Units (JUU) on Labor Absorption (PTK) in 10 Provinces of Sumatra Island. In the research there were 130 samples with secondary data types taken through BPS. The analysis technique used is panel data regression processed with Stata 17 with the best model being FEM and developed using the FGLS model due to classical assumption problems. The research results explain that TP and Investment have a significant positive effect on PTK, UMR does not have a significant and negative effect on PTK, and GRDP and JUU have a significant and negative effect on PTK. Simultaneously, it shows that TP, UMR, INV, GRDP, and JUU have a significant effect on PTK.*

**Keywords:** *Inflation Rate; IndONIA; BI7DRR; Money Supply; Exchange Rate*

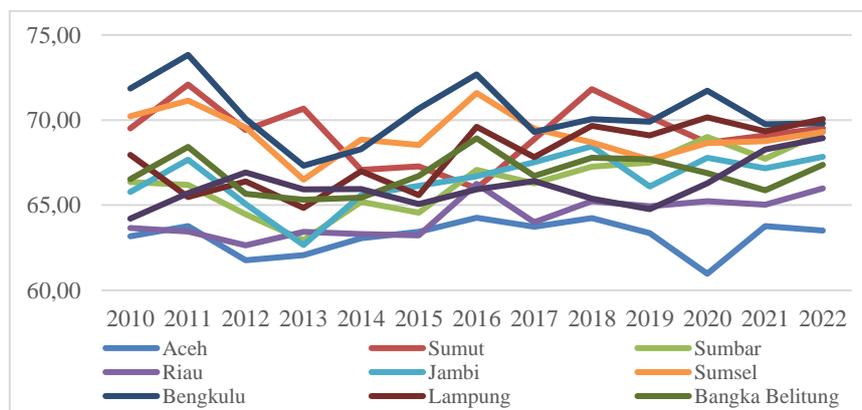
## 1. PENDAHULUAN

*Sustainable Development Goals* (SDGs) merupakan kesepakatan pembangunan baru yang memiliki prinsip universal, integrasi, dan inklusif untuk mendorong transisi menuju pembangunan berkelanjutan dengan menekankan pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) dan keselarasan bagi seluruh masyarakat, serta pentingnya berkolaborasi bersama semua pemangku kepentingan pembangunan. Prinsip inklusif dalam SDGs menyakinkan tidak adanya individu yang terlewat pada pembangunan berkelanjutan. SDGs memiliki salah satu *goals*-nya terkait menciptakan kesempatan kerja yang layak. Hal tersebut termuat pada SDGs poin ke-8 yang memiliki tujuan untuk meningkatkan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, kesempatan kerja produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan layak bagi seluruh masyarakat (Alisjahbana & Murniningtyas, 2018).

Pekerjaan yang layak untuk semua ialah upaya ILO dan organisasi nasional dalam mengurangi kemiskinan dan pengangguran di suatu wilayah. Oleh sebab untuk mendapati pekerjaan layak, pemerintah Indonesia harus menemukan solusi atas masalah ketenagakerjaan yang cukup besar dan multidimensional dengan menyediakan lapangan pekerjaan yang banyak sehingga terserapnya tenaga kerja (Santoso & Usman, 2020).

Indonesia sedang mengalami bonus demografi karena termasuk negara yang memiliki modal manusia dalam usia kerja terbesar di Indonesia. Selain itu, instabilitas angka pengangguran dari tahun ke tahun masih sangat tinggi sehingga membuktikan belum terciptanya kesempatan kerja yang layak dan menyeluruh. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), pada Agustus 2022, angka pengangguran terbuka di Indonesia masih tinggi dengan nilai 5.86 % artinya 8.42 juta jiwa penduduk tidak memiliki pekerjaan atau sedang mencari pekerjaan. Adanya pengangguran terjadi karena banyak dari angkatan kerja tidak terserap lapangan kerja tersedia. PTK sering di ukur dengan ukuran jumlah tenaga kerja bekerja atau Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). TPAK ialah komparasi antara angkatan kerja bekerja dengan jumlah penduduk usia kerja dalam persentase.

**Gambar 1. Tingkat Penyerapan Tenaga Kerja di 10 Provinsi Pulau Sumatera Tahun 2010-2022**



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

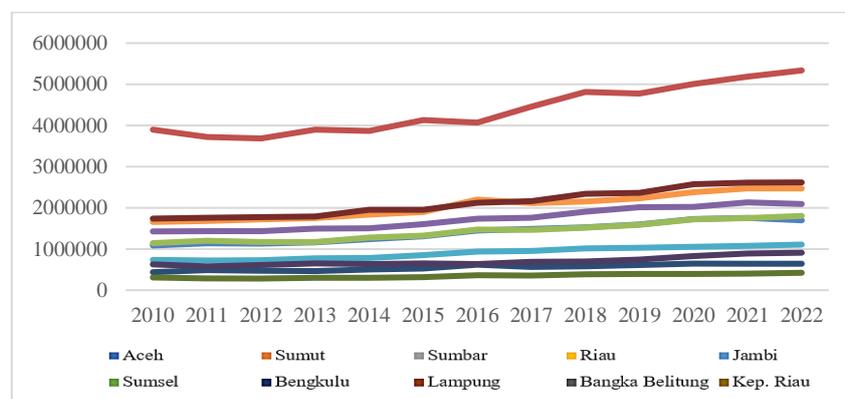
Berdasarkan grafik diatas, PTK di 10 Provinsi Pulau Sumatera mengalami fluktuasi, dimana tingkat PTK tertinggi berada pada tahun 2016 terletak di Provinsi Bengkulu sebesar 78.83%, serta terendah berada pada tahun 2020 terletak di Provinsi Aceh sebesar 60.97% tahun 2020. Persentase PTK ini dihitung atas dasar TPAK. Di tahun 2010-2014, rata-rata PTK di 10

Provinsi Pulau Sumatera ini mengalami penurunan. Keadaan tersebut menunjukkan hanya sedikit jumlah tenaga kerja yang terserap. Rendahnya PTK ini disebabkan adanya perkembangan penduduk lebih banyak dan membuat pasar bergerak dari sudut permintaan melalui *multiplier effect* karena permintaan agregat yang melonjak. Begitupula yang terjadi pada tahun 2017 dan 2019 yang mengalami penurunan. Fenomena di tahun 2017-2019 ini disebabkan karena pengurangan investasi pada beberapa sektor kunci di provinsi Sumatera, seperti penurunan investasi PMA di Sumatera Utara yang disebabkan oleh dampak krisis global dan perang dagang antara Amerika Serikat dan China sehingga memberikan dampaknya pada PTK yang turun. Sedangkan, keadaan kenaikan PTK di beberapa tahun menandakan lebih banyak orang yang masuk ke dalam angkatan kerja dan memiliki peluang besar dalam mendapatkan pekerjaan.

Setiap provinsi di Pulau Sumatera memiliki potensi SDA melimpah dan dapat dikembangkan menjadi lapangan pekerjaan. Potensi tersebut dapat menekan angka pengangguran dan menyerap tenaga kerja lebih banyak. Namun, keadaan PTK saat ini belum maksimal dikarenakan minim tata kelola SDA dan SDM yang berkualitas rendah, dimana pendidikan di beberapa Provinsi Pulau Sumatera masih menghadapi ketimpangan. Berdasarkan laporan Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, belum meratanya pembangunan infrastruktur di Pulau Sumatera juga menjadi alasan PTK ini masih memiliki celah besar. Dimana pada kawasan industri belum didukung dengan akses jalan, sumber daya air, dan keciptakaryaan sehingga PTK menjadi lebih sulit terlihat dari biaya transportasi, produktivitas tenaga kerja, keamanan dan keselamatan kerja. Keadaan tenaga kerja di Pulau Sumatera ini juga masih dipenuhi dengan banyaknya tenaga kerja dengan lulusan SD dan SMP, diartikan banyaknya tenaga kerja memiliki pendidikan di bawah rata-rata kebijakan pemerintah untuk wajib sekolah 12 tahun. Adapun tantangan perekonomian yang terjadi, salah satunya Provinsi Aceh yang maraknya kegiatan eksploitasi SDA yang mana diakibatkan adanya kebijakan dan implementasi yang tidak sesuai daya dukung lingkungan (Pusat Pemrograman Dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur PUPR, 2021).

Adanya Peraturan Pemerintah (PP) tentang UU Cipta Kerja, secara substansi telah banyak merugikan pekerja dengan penerapan regulasinya yang mempermudah mekanisme PHK dan sistem upah minimum yang diperhitungkan tanpa KHL sedangkan beban kerja bertambah karena sistem pekerjaan alih daya. Kebijakan ini dianggap lebih menguntungkan untuk pengusaha dibandingkan tenaga kerja seperti mempermudah perizinan usaha dan investasi, namun hal tersebut tidak terlepas dari kebijakan yang belum terintegrasi dengan baik, keterbatasan teknologi, dan tenaga kerja SDM yang rendah.

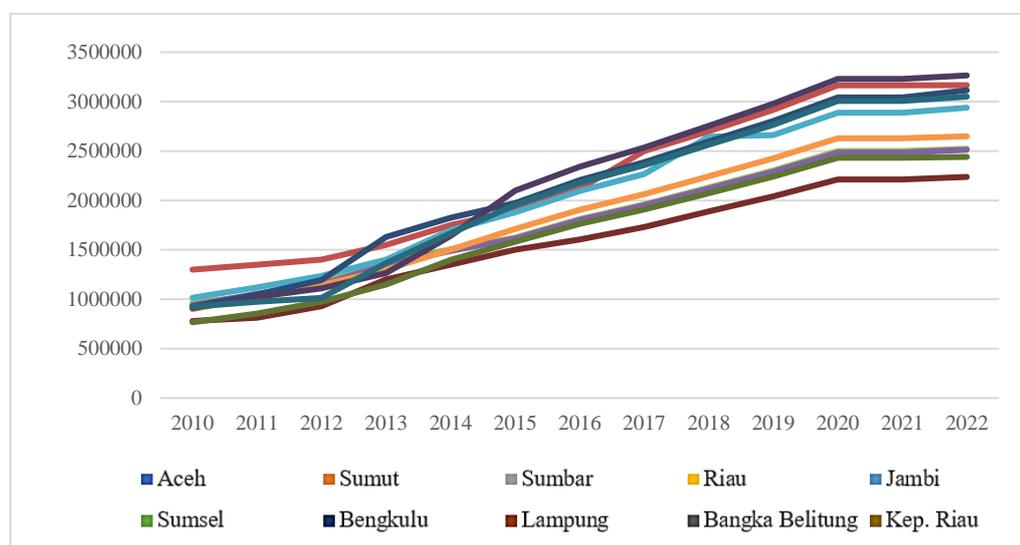
**Gambar 2. Tingkat Pendidikan (Jiwa) di 10 Provinsi Pulau Sumatera Tahun 2010-2022**



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Berdasarkan gambar diatas, TP menunjukkan tren yang meningkat tetapi PTK terjadi fluktuatif dan terdapat ketidaksesuaian antara teori *human capital*, serta Pulau Sumatera ini juga masih dipenuhi dengan banyaknya tenaga kerja dengan lulusan SD dan SMP, diartikan banyaknya tenaga kerja memiliki pendidikan di bawah rata-rata kebijakan pemerintah untuk wajib sekolah 12 tahun. TP tertinggi berada di Provinsi Sumatera Utara di tahun 2022 dengan jumlah 5,337,720 jiwa penduduk angkatan kerja memiliki ijazah tamatan dari SMP s.d pendidikan tinggi, sedangkan yang terendah berada di Provinsi Bangka Belitung di tahun 2012 dengan jumlah 282,172 jiwa penduduk memiliki ijazah tamatan pendidikan menengah dan tinggi. Provinsi Bengkulu memiliki rata-rata jumlah angkatan kerja yang cukup rendah sebanyak 552,638 jiwa penduduk, namun ternyata rata-rata PTK di Provinsi Bengkulu tertinggi yaitu 70.18%.

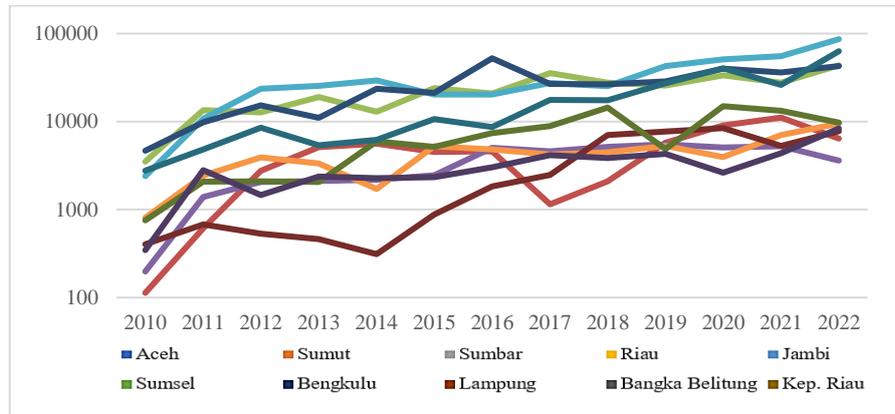
**Gambar 3. Upah Minimum Regional (Rupiah) di 10 Provinsi Pulau Sumatera Tahun 2010-2022**



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Kemudian, UMR yang setiap tahunnya mengalami peningkatan seharusnya dapat memberikan pengaruh yang positif terhadap PTK tetapi malah membuat PTK turun di beberapa daerah. Hal tersebut dilihat pada Peraturan Pemerintah (PP) tentang UU Cipta Kerja dengan sistem upah minimum yang diperhitungkan tanpa KHL sedangkan beban kerja bertambah karena sistem pekerjaan alih daya. Mengambil salah satu kasus di Provinsi Aceh memiliki rata-rata UMR yang diterima sebesar Rp 2,229,371 tetapi PTK lebih rendah dengan rata-rata sebesar 63.16% daripada provinsi lainnya. hal tersebut dikarenakan jumlah angkatan kerja di Aceh rendah akibat sistem pekerjaan alih daya yang membebankan tenaga kerja dan sektor pertanian yang menjadi andalan bagi masyarakat dalam menampung jumlah tenaga kerja yang relatif besar di Provinsi Aceh kini semakin kecil karena beralihnya fungsi lahan (Arida et al., 2015).

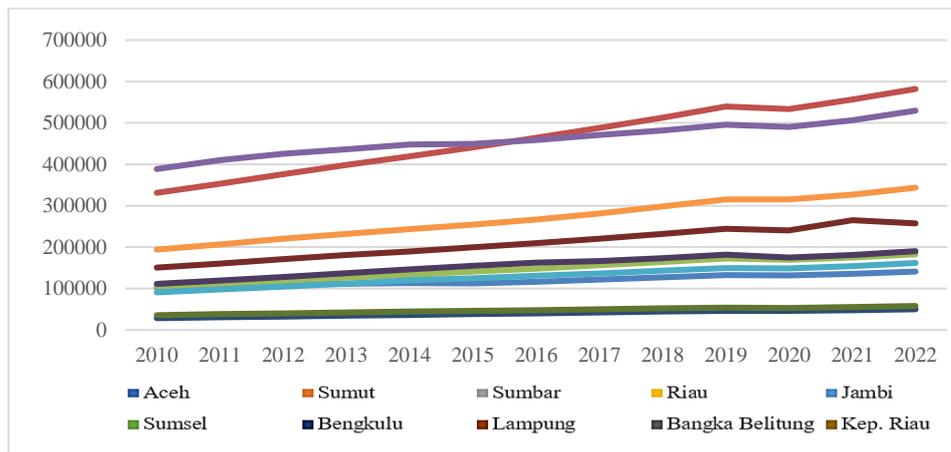
**Gambar 4. Jumlah Investasi (Miliar Rupiah) di 10 Provinsi Pulau Sumatera Tahun 2010-2022**



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Berdasarkan gambar diatas, rata-rata investasi mengalami peningkatan setiap tahunnya, kecuali tahun 2021 rata-rata investasi mengalami penurunan yang disebabkan oleh fenomena pandemi. Keadaan investasi yang meningkat tidak searah dengan tingkat PTK yang fluktuatif, dimana turun pada tahun 2012-2013, 2017, dan 2019. Investasi yang mengalami peningkatan ini tidak searah dengan tingkat PTK yang fluktuatif dan bertolak belakang dengan teori Keynes dan UU Cipta Kerja yang mempermudah investor masih belum terintegrasi dengan baik karena keterbatasan teknologi, dan tenaga kerja SDM yang rendah.

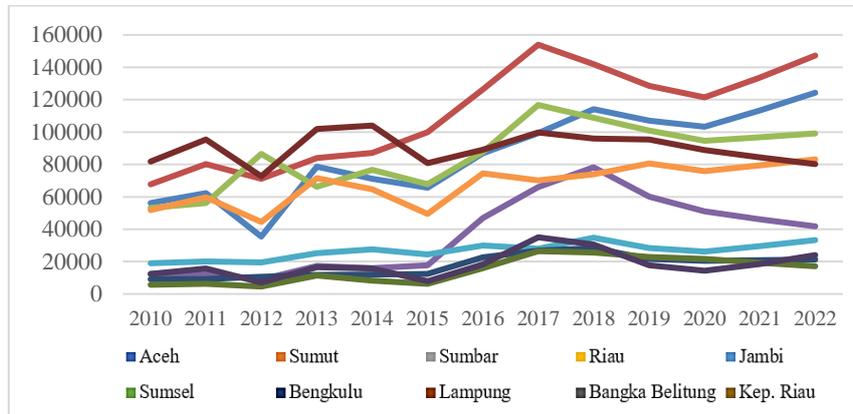
**Gambar 5. PRDB Harga Konstan 2010 (Miliar Rupiah) di 10 Provinsi Pulau Sumatera Tahun 2010-2022**



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Adapun faktor PDRB meningkat secara signifikan tetapi tidak dengan PTK yang mengalami fluktuasi, dimana hal tersebut menunjukkan kenaikan PDRB belum dapat meningkatkan terserapnya angkatan kerja yang ada dan bertolak belakang teori milik Keynes. Jika dilihat melalui sektor, PDRB tertinggi berada di sektor pertanian, hal ini menyebabkan PTK menumpuk di Pulau Provinsi saja karena adanya tingkat ruralisasi yang cukup tinggi. Artinya, terjadi perpindahan tenaga kerja hanya di setiap Provinsi Pulau Sumatera saja dari kota ke desa.

Gambar 5. Jumlah Unit Usaha di 10 Provinsi  
Pulau Sumatera Tahun 2010-2022



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Kemudian, JUU ini mengalami peningkatan tetapi fluktuatif di beberapa daerah akibat penurunan harga CPO dan peraturan syarat perizinan usaha yang memakan proses lama padahal UU Cipta Kerja sendiri diciptakan untuk mempermudah perizinan usaha. Peningkatan JUU tersebut tidak disertai dengan PTK yang rendah. Pada tahun 2012 dan 2015 terjadi penurunan rata-rata JUU, dimana di tahun 2012 menjadi sebesar 360,781 unit usaha yang ada dan di tahun 2015 turun hampir 51,060 unit sehingga menjadi 432,098 unit usaha

Adapun peran pemerintah atas kebijakan yang dilakukan belum optimal. Dimana pada kawasan industri belum didukung dengan akses jalan, sumber daya air, dan keciptakaryaan sehingga PTK menjadi lebih sulit terlihat dari biaya transportasi, produktivitas tenaga kerja, keamanan dan keselamatan kerja/ Adapun tantangan perekonomian yang terjadi, salah satunya Provinsi Aceh yang maraknya kegiatan eksploitasi SDA yang mana diakibatkan adanya kebijakan dan implementasi yang tidak sesuai daya dukung lingkungan (Pusat Pemrograman Dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur PUPR, 2021). Masalah PTK di Pulau Sumatera memiliki dampak yang buruk bagi perekonomian. Mengacu pada teori John Maynard Keynes (1936) dalam (Seran, 2023) yang menjadi dasar penelitian ini bahwa tidak adanya adaptasi mekanis yang menanggung perekonomian akan menjangkau *equilibrium* dalam menggunakan pekerja tingkat penuh. Keynes mengatakan bahwa perekonomian yang baik tercermin tenaga kerja secara penuh dan tidak adanya pengangguran. Konsep tersebut merupakan salah satu kunci dalam teori Keynes tentang pengangguran dan ketenagakerjaan sehingga Keynes berpendapat perlu adanya *government intervention* dalam menentukan kebijakan. Beberapa faktor penentu untuk menanggulangi pengangguran sehingga terciptanya terserapnya tenaga kerja dengan penggunaan tenaga kerja penuh yang dikatakan oleh Keynes dan studi-studi sebelumnya melalui jumlah penduduk, tingkat pendidikan, pertumbuhan ekonomi, investasi, pengeluaran pemerintah, permintaan kenaikan upah, tingkat inflasi, dan tingkat pertumbuhan PDB (Basrowi et al., 2018).

Dari rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka tujuan masalah yang dapat diperoleh adalah untuk mengetahui pengaruh tingkat pendidikan, upah minimum, investasi, produk domestik regional bruto, dan jumlah unit usaha terhadap penyerapan tenaga kerja di 10 Provinsi Pulau Sumatera tahun 2010-2022.

## 2. TINJUAN PUSTAKA

### *Teori Ketenagakerjaan Keynes*

Teori Ketenagakerjaan yang disampaikan oleh John Maynard Keynes (1883-1946) dalam (Subri, 2012) menegaskan tentang proses makro ialah suatu perjalanan mencapai keseimbangan umum dengan tidak adanya mekanisme sistem penyesuaian langsung yang menjamin perekonomian akan memperoleh keseimbangan menggunakan tenaga kerja secara penuh dan mengakui adanya fluktuasi siklus bisnis ekonomi. Konsep tujuan tenaga kerja penuh dalam teori Keynes mencerminkan tujuan ekonomi dimana tenaga kerja digunakan secara penuh atau mendekati penuh dengan pengangguran yang minimal dan stabilitas makroekonomi. Dalam situasi ini, maka ekonomi menghadapi pengangguran yang tinggi yang artinya tenaga kerja tidak terserap sehingga Keynes mengatakan diperlukannya kebijaksanaan yang dilakukan pemerintah artinya campur tangan pemerintah dilakukan. Peran pemerintah ini sebagai penentu kebijakan dalam menyediakan dan mengelola pengeluaran publik di berbagai sektor seperti pendidikan, infrastruktur, kesehatan, keamanan, dan lainnya. Peningkatan pengeluaran publik untuk mendorong permintaan agregat dan memicu pertumbuhan ekonomi sehingga akan berdampak pada penggunaan tenaga kerja penuh yang mendorong perekonomian (Ekawarna & Muslim, 2008). Keynes juga mengatakan untuk memenuhi tenaga kerja dan menekan pengangguran dilakukan kegiatan investasi yang banyak, contohnya investasi pada mesin dengan begitu akan dibutuhkan operator sehingga secara langsung atau tidak dapat meningkatkan PTK dan investasi SDM melalui pendidikan untuk menambah kemampuan dan keterampilan tenaga kerja. John Maynard Keynes mengatakan upah minimum memiliki dampak pada pasar tenaga kerja dengan tujuan pelaksanaannya untuk pekerja agar upah yang terima oleh pekerja transparan dan tidak dibayar kurang dari yang diseharusnya untuk KHL, serta melindungi daya produktif TK untuk peningkatan produksi sehingga kenaikan permintaan atas pemakaian barang jasa mampu meningkatkan permintaan TK dan memberikan peluang pada TK yang tidak pernah bekerja (Anamathofani, 2019).

### *Teori Human Capital*

Menurut Todaro (1993) dalam (Nurkholis, 2018) mengatakan bahwa *human capital* di ukur melalui dua aspek yaitu pendidikan dan kesehatan. Dimana pendidikan yang tinggi akan meningkatkan produktivitas dengan keterampilan dan pengetahuan yang dimiliki. Sehubungan dengan meningkatkan produktivitas tanpa adanya kesehatan yang baik dalam tubuh, maka produktivitas pun tidak akan terlaksana. Indikator pengukuran dalam pendidikan tergabung dua elemen yaitu Angka Melek Huruf (AHH) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS). Menurut Romer (1999) *human capital* ialah dasar utama kemajuan ekonomi sebagai pengeluaran manusia untuk memperbaiki keadaan. Adapun teori *human capital* dikemukakan oleh Schultz (1961) menyatakan bahwa modal manusia ialah salah satu unsur utama dalam meningkatkan produktivitas ekonomi termasuk dari dampak angkatan kerja terhadap produktivitas. Terdapat dua cara yaitu manusia sebagai TK berdasarkan jumlah kuantitatifnya artinya produktivitas meningkat seiring dengan peningkatan jumlah tenaga kerja dan investasi pendidikan dan pelatihan yang tidak lagi mengutamakan kuantitas tenaga kerja (Nurkholis, 2018). Menurut Gary S. Becker (1993) dalam (Adriani, 2019) menyatakan bahwa pelatihan dan pendidikan merupakan kegiatan yang mempengaruhi produktivitas. Becker menjelaskan manusia bukan saja menjadi sumber daya tetapi sebagai modal yang memberikan hasil pengembalian dan setiap pengeluaran untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas modal yang disebut sebagai investasi.

### ***Penyerapan Tenaga Kerja***

Menurut BPS, terdapat dua kelompok tenaga kerja yaitu angkatan kerja dan non-tenaga kerja. Angkatan kerja ialah penduduk dengan umur produktif 15-65 tahun yang kerja dan belum kerja, sedangkan non-tenaga kerja ialah masih sekolah, mengelola rumah tangga, dan tidak beraktivitas kerja. Menurut Todaro dalam (Lube et al., 2021) PTK ialah penerimaan pelaku angkatan kerja yang memiliki kemampuan untuk melakukan pekerjaan sebagaimana adanya tempat kerja yang tersedia sehingga dapat diisi dengan TK yang sedang mencari pekerjaan. Sedangkan, menurut Kuncoro (2012) PTK ialah warga dengan kesanggupan melakukan pekerjaan di usia produktif baik itu warga yang sedang menanggur. PTK sering diukur menggunakan ukuran jumlah tenaga kerja bekerja atau TPAK. TPAK ialah sejumlah angkatan kerja dibandingkan dengan penduduk usia kerja dalam bentuk persentase.

### ***Tingkat Pendidikan***

Pendidikan ialah alat penting yang diperlukan bakal karier. Pendidikan ialah kegiatan yang mengembangkan kreatifitas, wawasan, dan independensi. Sektor pendidikan diajukan untuk memaksimalkan daya produktif sehingga menghasilkan perubahan kualitas tenaga kerja yang lebih baik (Hasmawati et al., 2021). Menurut Becker dalam (Yulistiyono et al., 2021) dikatakan bahwa kemampuan manusia dapat dilakukan melalui proses pendidikan yang dilihat melalui bobot pembelajaran TK dari seberapa tinggi pendidikan yang dapat dilampaui.

### ***Upah Minimum Regional***

Menurut Keynes dalam (Lokanathan V, 2018), Upah Minimum Regional (UMR) yang tinggi akan meningkatkan daya beli tenaga kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan konsumsi. Situasi yang memperlihatkan kelebihan kapasitas produksi dan pengangguran, peningkatan pengeluaran melalui kenaikan UMR dapat merangsang permintaan agregat dan penyerapan tenaga kerja. Adapun Konsep upah subsistensi oleh David Ricardo (1772-1823) dalam (Lube et al., 2021) upah dipatok atas dasar pengadaan dan lamaran tenaga kerja. Diasumsikan bahwa jika pendapatan angkatan kerja bertambah diatas perubahan pangalihan hingga angkatan bekerja akan berkembang pesat.

### ***Investasi***

Keynes mengembangkan konsep efek *multiplier* yang mengatakan bahwa investasi dapat memicu peningkatan permintaan agregat. Investasi ini tidak merujuk pada pembelian saham atau obligasi, tetapi pada pengeluaran perusahaan atau realisasi modal untuk pembaharuan fasilitas atau pembangunan kapasitas produk baru. Dalam meningkatkan permintaan agregat, Keynes menyatakan diperlukan campur tangan pemerintah dalam mengatur kebijakan untuk mencapai kondisi tenaga kerja yang penuh karena tidak dapat tercapai dengan sendirinya. Ketika investasi meningkat maka akan menyebabkan produksi juga meningkat sehingga berimbas kepada penyerapan tenaga kerja (Firmansah, 2019). Kemudian, Harrod-Domar melihat investasi sebagai penyisihan dana untuk keperluan dalam meningkatkan ekonomi sehingga meluaskan produksi, maupun penambahan untuk pembiayaan yang bersangkutan pada permintaan agregat. Adapun menurut Gunawan dalam (Wulansari et al., 2021) bahwa investasi ialah penanaman modal perseroan pada berbagai harta termasuk alat produksi dalam kegiatan ekonomi. Besarnya investasi modal dapat berdampak pada perekonomian dengan memproduksi lebih banyak barang dan jasa sehingga merangsang permintaan agregat. Investasi dapat dibedakan menjadi investasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), investasi swasta, dan investasi pemerintah umum.

### ***Produk Domestik Regional Bruto***

Hukum Okun (*Okun's Law*) yang dijelaskan oleh Mankiw (2006) dalam (Rahmah & Juliannisa, 2022) bahwa setiap 1% penurunan pengangguran akan mengakibatkan hubungan kenaikan mendekati 2% pada PDB Rill. Hal tersebut dikatakan ada hubungan negatif antara PDB Rill. Menurut Keynes, pertumbuhan ekonomi adalah proses yang di dorong oleh permintaan agregat yang menjadi faktor utama dalam menentukan tingkat *output* dan lapangan kerja dalam perekonomian sehingga PDRB dapat digunakan sebagai alat ukur pertumbuhan ekonomi. Dimana semakin tinggi permintaan agregat akan meningkatkan pula PDRB dan akhirnya akan menyerap tenaga kerja ke lapangan pekerjaan (Basrowi et al., 2018).

### ***Jumlah Unit Usaha***

Menurut Prabaningtyas dalam (Wulansari et al., 2021) secara makro nilai tambah yang dilakukan industri ini tidak hanya sekedar menunjang peningkatan PDB tetapi juga dalam meningkatkan kelayakan hidup masyarakat sebagai tempat bekerja. Adapun menurut Dwi dalam (Chomariah, 2023) usaha ialah tempat yang melahirkan produk dengan tujuan mencapai SDGs. Kegiatan produksi melibatkan berbagai faktor diantara lainnya tenaga kerja, modal, mesin, dan teknologi yang bergerak untuk memberikan kontribusi yang besar pada kemajuan ekonomi, memperluas jaringan yang membuka lapangan kerja, menambahkan penghasilan, serta KHL. Menurut John M. Keynes mengatakan bahwa industri merupakan sektor yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, dimana pemerintah memiliki peran serta dengan mengatur pertumbuhan ekonomi ini melalui peningkatan di sektor industri.

## **3. METODOLOGI PENELITIAN**

### ***Populasi dan Sampel***

Dalam penelitian ini sampelnya menggunakan teknik *purposive sampling*. Menurut (Sugiyono, 2019), dimana dengan pengambilan teknik ini tidak diberikan ruang yang sama pada setiap bagian populasi itu sendiri yang menjadi sampel penelitian. Penelitian ini menggunakan 130 sampel observasi yang terdiri dari 10 Provinsi di Pulau Sumatera dikali dengan jumlah tahun dalam penelitian selama 13 tahun dari 2010-2022.

### ***Teknik Pengumpulan Data***

Penelitian ini memakai jenis data sekunder yang didapatkan secara tidak langsung dan bersumber dari publikasi oleh pihak BPS. Data yang digunakan bersifat kuantitatif, hasilnya menggunakan angka perhitungan yang diolah dan dianalisis berdasarkan prosedur statistik sehingga menjelaskan fakta dari kejadian dan permasalahan yang diteliti. Data tersebut terdiri dari penggabungan antara 10 Provinsi Pulau Sumatera dan deret waktu 2010-2022 yang diolah menggunakan program Software STATA 17. Selain itu, dikumpulkan melalui kepustakaan yang dipakai guna mengakumulasikan informasi dan data yang berasal dari literatur berupa buku, jurnal, *website*.

### ***Teknik Analisis Data***

*Fixed Effect Model* (FEM) menjadi pengujian terbaik diantara uji *chow*, *hausman*, dan *langrange multiplier*. Namun, hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adanya masalah heteroskedastisitas dan autokorelasi sehingga untuk mengatasi permasalahan tersebut peneliti melakukan *treatment* dengan menggunakan uji *Feasible Generalized Least Square* (FGLS)

karena metode OLS tidak efisien digunakan. Permasalahan yang terjadi pada asumsi klasik membuat validitas hasil estimasi diragukan dan memberikan hasil analisa yang salah. Penggunaan metode FGLS dianggap mampu menghasilkan penduga yang bersifat BLUE. Menurut Parks (1967) dalam (Reed & Webb, 2011), FGLS ialah metode *least square* yang menduga koefisien regresi untuk mengatasi permasalahan saat adanya pelanggaran asumsi klasik. Penelitian ini menggunakan model FGLS.

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### *Uji Asumsi Klasik*

##### *Uji Normalitas*

**Tabel 1. Hasil Uji Normalitas**

Pr (Skewness)	0.1895
Prob > chi2	0.3625

Sumber: Hasil olah data Stata 17

Dilihat dari tabel diatas, nilai probabilitas sebesar  $0.3625 > \alpha 0.05$  sehingga data pada penelitian ini dinyatakan berdistribusi normal.

##### *Uji Multikolinieritas*

**Tabel 2. Hasil Uji Multikoleniaritas**

	<b>LNTP</b>	<b>LNUMR</b>	<b>LNINV</b>	<b>LNPDRB</b>	<b>LNJUJU</b>
<b>TP</b>	1.0000				
<b>LNUMR</b>	0.1425	1.0000			
<b>LNINV</b>	0.5153	0.5740	1.0000		
<b>LNPDRB</b>	0.7542	0.2478	0.7260	1.0000	
<b>JUU</b>	0.7774	0.2528	0.2853	0.5445	1.0000

Sumber: Hasil olah data Stata 17

Dilihat dari tabel 2, menggunakan nilai korelasi data dinyatakan telah terbebas dari masalah multikolinieritas karena setiap variabel nilai korelasinya tidak melebihi 0.9 dari data yang ditampilkan.

##### *Uji Heterokedastisitas*

**Tabel 3. Hasil Uji Heterokedastisitas**

Chi2 (10)	99.31
Prob > chi2	0.00000

Sumber: Hasil olah data Stata 17

Dilihat dari tabel diatas, bahwa (Prob > Chi2) sebesar  $0.0000 < 0.05$  yang menyatakan bahwa model regresi masih terkena permasalahan heteroskedastisitas.

*Uji Autokorelasi*

**Tabel 4. Hasil Uji Autokorelasi Antar Periode Waktu**

F (1,9)	3.717
Prob > F	0.0860

Sumber: Hasil olah data Stata 17

Dilihat dari tabel diatas, uji autokorelasi yang terjadi antar periode waktu (*time series*) pada individu yang sama atau dikenal dengan serial korelasi atau *temporal correlation* yaitu melakukan uji *Wooldridge Test* dengan melihat nilai  $(Prob > F) > \alpha 0.05$  maka data terbebas dari masalah autokorelasi. Hasil menunjukkan probabilitasnya sebesar  $0.0860 > 0.05$  terbebas dari masalah autokorelasi antar periode waktu.

**Tabel 5. Hasil Uji Autokorelasi Antar Cross Section**

<i>Pesaran's test</i>	4.052, Pr = 0.0001
-----------------------	--------------------

Sumber: Hasil olah data Stata 17

Dilihat dari tabel diatas, uji autokorelasi untuk melihat autokorelasi yang terjadi antar individual atau unit *cross section* pada periode waktu yang sama dikenal dengan *cross sectional correlation* atau *cross sectional independence* melalui *Pesaran Test*. Hasil probabilitas sebesar  $0.0001 < 0.05$  maka dinyatakan terdapat permasalahan autokorelasi.

*Uji Hipotesis dan Analisis*

*Uji Z*

**Tabel 6. Uji Z**

PTK	Coef.	z	P> z
TP	0.00000257	9.17	0.000
LNUMR	-0.9559952	-1.56	0.119
LNINV	0.5268423	3.97	0.000
LNPDRB	-2.932797	-10.74	0.000
JUU	-0.0000134	-3.90	0.002
_Cons	107.6471	12.64	0.000

Sumber: Hasil olah data Stata 17

a. Pengujian terhadap variabel Tingkat Pendidikan (TP)

Berdasarkan hasil regresi di atas, TP mempunyai  $Z_{hitung} (9.17) > Z_{tabel} (1.96)$ . Nilai probabilitas yang diperoleh variabel TP sebesar  $0.000 < \alpha 0.05$ . Berarti keputusannya adalah Hipotesis  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima atau dengan kata lain variabel TP berpengaruh signifikan terhadap PTK di 10 Provinsi Pulau Sumatera sebab probabilitasnya lebih kecil dari alpha 5%. Artinya, TP tenaga kerja memiliki pengaruh yang besar terhadap kemampuan untuk diterima dan dipekerjakan dalam lapangan pekerjaan.

b. Pengujian terhadap variabel Upah Minimum Regional (UMR)

Berdasarkan hasil regresi di atas, UMR mempunyai  $Z_{hitung} (-1.56) < Z_{tabel} (1.96)$ . Nilai probabilitas yang diperoleh variabel UMR sebesar  $0.119 > \alpha 0.05$ . Berarti keputusannya adalah Hipotesis  $H_0$  diterima dan  $H_2$  ditolak atau dengan kata lain variabel UMR tidak berpengaruh signifikan terhadap PTK di 10 Provinsi Pulau Sumatera sebab probabilitasnya

lebih besar dari alpha 5%. Artinya, besaran UMR tidak memiliki dampak yang besar terhadap jumlah tenaga kerja yang diterima atau dipekerjakan dalam lapangan pekerjaan.

c. Pengujian terhadap variabel Investasi (INV)

Berdasarkan hasil regresi di atas, INV mempunyai  $Z_{hitung} (3.97) > Z_{tabel} (1.96)$ . Nilai probabilitas yang diperoleh variabel INV sebesar  $0.000 < \alpha 0.05$ . Berarti keputusannya adalah Hipotesis  $H_0$  ditolak dan  $H_3$  diterima atau dengan kata lain variabel INV berpengaruh signifikan terhadap PTK di 10 Provinsi Pulau Sumatera sebab probabilitasnya lebih kecil dari alpha 5%. Artinya, penanaman modal dalam negeri maupun luar negeri untuk proyek pembangunan ekonomi memiliki dampak yang besar terhadap PTK.

d. Pengujian terhadap variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Berdasarkan hasil regresi di atas, PDRB mempunyai  $Z_{hitung} (-10.74) < Z_{tabel} (1.96)$ . Nilai probabilitas yang diperoleh variabel PDRB sebesar  $0.000 < \alpha 0.05$ . Berarti keputusannya adalah Hipotesis  $H_0$  ditolak dan  $H_4$  diterima atau dengan kata lain variabel PDRB berpengaruh signifikan terhadap PTK di 10 Provinsi Pulau Sumatera sebab probabilitasnya lebih kecil dari alpha 5%. Artinya, tingkat kegiatan ekonomi di suatu wilayah yang diukur melalui PDRB memiliki dampak yang besar terhadap kemampuan wilayah untuk menyerap tenaga kerja.

e. Pengujian terhadap variabel Jumlah Unit Usaha (JUJ)

Berdasarkan hasil regresi di atas, JUJ mempunyai  $Z_{hitung} (-3.90) < Z_{tabel} (1.96)$ . Nilai probabilitas yang diperoleh variabel JUJ sebesar  $0.002 < \alpha 0.05$ . Berarti keputusannya adalah Hipotesis  $H_0$  ditolak dan  $H_5$  diterima atau dengan kata lain variabel JUJ berpengaruh signifikan terhadap PTK di 10 Provinsi Pulau Sumatera sebab probabilitasnya lebih kecil dari alpha 5%. Artinya, jumlah usaha dalam suatu wilayah memiliki dampak besar terhadap kemampuan wilayah untuk menyerap tenaga kerja.

**Uji F**

**Tabel 7. Hasil Uji F**

Wald Chi (5)	148.31
Prob > Chi2	0.0000
Sig.	0.05

Sumber: Hasil olah data Stata 17

Dapat dilihat dari tabel diatas, bahwa nilai  $F_{hitung} (148.31) > F_{tabel} (2.444174)$  dengan nilai Prob > Chi2 sebesar  $0.0000 < \alpha 0.05$  artinya secara statistik variabel bebas pada penelitian ini yakni TP, UMR, INV, PDRB, dan JUJ bersama-sama secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap PTK sebagai variabel terikat.

**Uji Koefisien Determinasi**

**Tabel 8. Hasil Keofisien Determinasi**

Overall R-Squared	0.2594
-------------------	--------

Sumber: Hasil olah data Stata 17

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat nilai koefisien determinasi sebesar 0.2594 atau sejumlah 25.94% yang mampu menjelaskan pengaruh variabel bebas TP, UMR, INV, PDRB,

dan JUU terhadap PTK sebagai variabel terikat, sedangkan sisanya sebesar 74.06% dapat dijelaskan oleh variabel lainnya, seperti RLS, Inflasi, Pengeluaran Pemerintah, PMDN, PMA, Jumlah Produksi, IMK, IBS, Volume Penjualan, Jumlah Penduduk, Ekspor Daerah, dan lainnya.

### ***Analisis Ekonomi dan Pembahasan***

#### ***Analisis Pengaruh Variabel Tingkat Pendidikan Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja***

Hasil pengujian menunjukkan bahwa TP berpengaruh signifikan positif terhadap PTK, artinya kenaikan TP akan meningkatkan PTK di Provinsi Pulau Sumatera dan sebaliknya. Pada penelitian ini dibuktikan di salah satu Provinsi Pulau Sumatera yaitu Provinsi Sumatera Utara terjadi kenaikan dan penurunan TP selaras dengan yang terjadi pada PTK yang mengalami kenaikan dan penurunan, kecuali di tahun 2020. Berdasarkan Laporan Perekonomian Indonesia (LPI), pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk mendukung ekonomi pendidikan sebesar Rp 612.2 triliun untuk melakukan beberapa upaya untuk meningkatkan PTK melalui pendidikan, seperti program Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang jumlah penerimanya sekitar 2.3 juta jiwa di Provinsi Pulau Sumatera, revitalisasi pendidikan dengan program pelatihan kerja secara gratis dengan banyaknya kejuruan, sistem magang dan sertifikasi yang bekerja sama dengan perusahaan, pengembangan riset dan teknologi, serta program Asesman Nasional (AN) oleh untuk meningkatkan kualitas pendidikan (Bank Indonesia, 2022).

Hasil ini sejalan dengan teori *human capital* oleh Becker dalam (Safitri, 2020) bahwa manusia bukan saja menjadi sumber daya tetapi sebagai investasi dalam meningkatkan kualitas angkatan kerja. Hasil ini sejalan dengan teori *human capital* oleh Becker dalam (Safitri, 2020) bahwa manusia bukan saja menjadi sumber daya tetapi sebagai investasi dalam meningkatkan kualitas angkatan kerja. Hasil ini didukung penelitian oleh (Rahmah & Juliannisa, 2022) yang menemukan hasil bahwa TP memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap PTK di Provinsi Jawa Barat. PTK yang masuk ke lapangan kerja di Jawa Barat ini dilalui dengan pendidikan tingkat tinggi yang naik sepanjang tahun 2017-2020.

#### ***Analisis Pengaruh Variabel Upah Minimum Regional Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja***

Hasil pengujian menunjukkan bahwa UMR tidak berpengaruh signifikan dan negatif terhadap PTK, artinya kenaikan UMR dapat menurunkan PTK di Provinsi Pulau Sumatera. Hal ini menandakan bahwa dengan kenaikan UMR tidak mampu menyerap tenaga kerja sehingga diperlukan faktor lain yang dapat mendukung tujuan pembangunan ekonomi berkelanjutan dalam menyerap tenaga kerja secara menyeluruh. Pada penelitian ini dibuktikan dengan keadaan UMR yang terus mengalami peningkatan tetapi tidak mempengaruhi PTK yang masih keadaan yang fluktuatif disetiap provinsinya. Menjadi contoh ketika UMR di tahun 2012 meningkat secara keseluruhan, tetapi beberapa Provinsi di Pulau Sumatera mengalami penurunan PTK kecuali Provinsi Lampung yang mencapai 66.30% dan Kepulauan Riau sebesar 66.92%. Hal tersebut dikarenakan mayoritas masyarakat bekerja pada sektor informal. Adapun penerapan kebijakan UMR yang ditetapkan pemerintah tidak berjalan dengan baik dikarenakan masih ada pihak pengusaha yang memberikan upah dibawah minimum seperti kejadian di Sumatera Selatan (Elko, 2022) yang didukung dengan peraturan pemerintah UU Cipta Kerja untuk upah minimum tidak memperhitungkan KHL, serta tidak diiringi dengan kebijakan lain yang mendukung peningkatan PTK, seperti pengembangan infrastruktur, pelatihan kerja, dan pemberian intensif untuk pengusaha yang menciptakan lapangan kerja.

Hal ini tidak sejalan dengan teori John Maynard Keynes tentang hubungan upah dan tenaga kerja yang menjelaskan bahwa Upah Minimum Regional (UMR) yang tinggi akan meningkatkan daya beli tenaga kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan konsumsi, serta keseimbangan pasar tenaga kerja. Namun, sejalan dengan teori Neo-Klasik yang menekankan pada mekanisme pasar bebas dan menyakini harga upah seharusnya ditentukan tanpa campur tangan pemerintah karena upah seharusnya mengikuti hukum permintaan dan penawaran pada tingkat upah tertentu. Hasil ini didukung penelitian oleh (Wulansari et al., 2021) bahwa UMR tidak berpengaruh terhadap PTK di Kabupaten Tuban dan penelitian oleh (Anamathofani, 2019) yang mendapatkan hasil penelitian serupa dikarenakan Kota Malang punya lebih banyak penduduk yang bekerja pada pasar primer atau sektor formal dibandingkan dengan yang bekerja di informal.

### ***Analisis Pengaruh Variabel Investasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja***

Hasil pengujian menunjukkan bahwa INV berpengaruh signifikan positif terhadap PTK, artinya kenaikan INV akan meningkatkan PTK di Provinsi Pulau Sumatera dan sebaliknya. Kenaikan 7 Provinsi lainnya di Pulau Sumatera ini diikuti dengan PTK yang mengalami peningkatan secara keseluruhan di tahun 2018. Artinya, kenaikan INV memberikan pengaruh terhadap PTK di beberapa Provinsi Pulau Sumatera. Kenaikan INV di Pulau Sumatera tahun 2018 dikarenakan kenaikan pajak penghasilan yang dipengaruhi oleh kenaikan jumlah penduduk yang bekerja di 7 Provinsi Pulau Sumatera tersebut dan membaiknya perdagangan global dengan adanya kebijakan fiskal Amerika Serikat yang melonggar sehingga membuat investasi meningkat. Adanya kebijakan transformasi aspek reformasi struktural, pemerintah daerah telah melakukan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) melalui UU Cipta Kerja. Pemerintah berperan sebagai fasilitator dalam menyediakan infrastruktur, fasilitas pendukung, dan intensif, serta kemudahan perizinan kepada investor. Kebijakan pembangunan KEK diarahkan untuk menarik investasi dalam meningkatkan produktivitas industri, serta pengembangan SDM di sekitar KEK untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja industri. KEK di Provinsi-Provinsi Sumatera telah beroperasi dan membantu penciptaan lapangan kerja, dimana secara keseluruhan jumlah tenaga kerja yang terserap dengan hadirnya KEK adalah sekitar 86.273 jiwa di kuartal III tahun 2023 (Wisnubroto, 2023).

Hal ini sejalan dengan teori John Maynard Keynes, dimana Keynes mengembangkan kebijakan fiskal terhadap investasi menggunakan konsep efek *multiplier* yang mengatakan bahwa investasi dapat memicu peningkatan permintaan agregat. Ketika permintaan agregat meningkat, hal tersebut ditandai dengan produksi yang meningkat sehingga untuk memenuhi produksi tersebut suatu perusahaan akan membutuhkan tenaga kerja dan mengakibatkan PTK mengalami peningkatan. Hasil juga didukung dengan penelitian oleh (Wahyudi et al., 2023) yang menyatakan hasil bahwa investasi dengan PMDN dan PMA berpengaruh terhadap PTK di Provinsi Kalimantan Timur. Adapun penelitian oleh (Basuki & Lestari, 2022) hasil dari penelitiannya disebutkan bahwa investasi berpengaruh signifikan dan positif terhadap PTK di Kepulauan Riau tahun 2010-2019.

### ***Analisis Pengaruh Variabel PDRB Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja***

Hasil pengujian menunjukkan bahwa PDRB berpengaruh signifikan negatif terhadap PTK, artinya kenaikan satu rupiah PDRB harga konstan akan menurunkan PTK di Provinsi

Pulau Sumatera. Pada penelitian ini dibuktikan selama 13 tahun PDRB cenderung mengalami peningkatan kecuali di tahun 2020 PDRB mengalami penurunan akibat fenomena pandemi, namun PTK berfluktuasi. Kejadian di tahun 2012 membuktikan kenaikan PDRB menurunkan PTK di Provinsi Pulau Sumatera kecuali PTK di Lampung dan Kepulauan Riau yang meningkat. Kemudian, di tahun 2017 mengalami kejadian serupa dimana PDRB meningkat tetapi PTK mengalami penurunan di Provinsi Pulau Sumatera kecuali Provinsi Sumatera Utara dan Jambi. Adapun pada tahun 2015, hanya di Provinsi Aceh PDRB mengalami penurunan menjadi 112665.27 Miliar Rupiah dengan PTK yang meningkat 63.44%. Implementasi yang dilakukan pemerintah ternyata juga belum maksimal. Berdasarkan RPJMN tahun 2015-2019, peningkatan pembangunan infrastruktur belum berhasil membuat beberapa daerah di Sumatera mencapai pertumbuhan ekonomi yang setara dengan PDB nasional (Kementerian PPN/Bappenas, 2019).

Hal ini tidak sejalan dengan Hukum Okun (*Okun's Law*) yang dijelaskan oleh Mankiw (2006) bahwa 1% penurunan pengangguran akan meningkatkan 2% PDB. Salah satu indikator PDB adalah PDRB, artinya ketika PDRB meningkat maka tenaga kerja bertambah atau PTK meningkat. Di dukung dengan pendapat Keynes tentang PDRB sebagai alat ukur pertumbuhan ekonomi yang memperlihatkan proses permintaan agregat. Adapun penelitian oleh (Safitri, 2020) yang menyatakan hasil yang sama, dimana hubungan antara PDRB dan PTK memiliki pengaruh yang signifikan negatif. Korelasi negatif ini dikarenakan semakin berkurangnya perusahaan padat karya yang sebelumnya mendominasi di Pulau Jawa dan kemudian diganti dengan perusahaan padat modal.

### ***Analisis Pengaruh Variabel Jumlah Unit Usaha Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja***

Hasil pengujian menunjukkan bahwa JUU berpengaruh signifikan negatif terhadap PTK, artinya bertambahnya JUU akan menurunkan PTK di Provinsi Pulau Sumatera. Pada penelitian ini dibuktikan keadaan JUU sempat mengalami penurunan di tahun 2015 akibat harga CPO yang menurun tetapi rata-rata PTK sedikit mengalami kenaikan, kemudian di tahun 2017 di Provinsi Pulau Sumatera mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya tetapi 2 Provinsi yaitu Provinsi Jambi dan Sumatera Selatan mengalami penurunan JUU. Adapun, peningkatan upah minimum menjadi alasan beberapa usaha mengurangi jumlah tenaga kerja karena perusahaan tidak dapat lagi membayar upah yang tinggi tanpa menaikkan harga produk barang dan jasa yang diproduksi, yang dapat menyebabkan penurunan permintaan tenaga kerja. Kemudian, pemerintah daerah di Provinsi Pulau Sumatera telah melakukan dukungan perkembangan sektor usaha melalui UU tentang Cipta Kerja yang membuat terobosan mempermudah perizinan usaha dengan membentuk sistem pelayanan satu atap, memberikan modal bantuan, dan perlindungan hukum bagi pelaku usaha agar mampu menjadi lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Namun, implementasi sistem perizinan usaha berbasis risiko yang sudah berjalan dua tahun terakhir dinilai belum efektif karena masih banyak usaha yang belum terproses setelah mendaftarkan usahanya.

Hal ini tidak sejalan dengan teori John Maynard Keynes yang mengatakan bahwa industri ialah sektor yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dengan campur tangan pemerintah yang mengatur perekonomian melalui peningkatan sektor industri sehingga dapat memenuhi permintaan agregat dan akhirnya akan membutuhkan tenaga kerja. Teori yang menjelaskan hasil penelitian ini adalah teori inovasi oleh Joseph Schumpeter yang membahas konsep kreativitas perusahaan dan peran inovasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

Schumpeter berpendapat tentang perubahan ekonomi yang dipicu oleh inovasi. Penelitian oleh (Saputra et al., 2022) mendukung hasil penelitian ini, dimana JUU memiliki hubungan negatif signifikan terhadap PTK di Provinsi Sumatera Barat pada sektor IBS. Hal ini terjadi karena proses produksi perusahaan manufaktur di Sumbar masih padat modal dan lebih sering menggunakan alat berat daripada manusia.

## 5. SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini yakni:

- a. Tingkat Pendidikan (TP) berpengaruh signifikan positif terhadap Penyerapan Tenaga Kerja (PTK). Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan TP akan menyebabkan kenaikan pula pada PTK di Pulau Sumatera. Hal ini menunjukkan setiap tamatan jenjang pendidikan antara SMP-Universitas mempengaruhi bagaimana tenaga kerja itu sendiri dapat masuk ke lapangan pekerjaan sehingga sejalan dengan teori *human capital* dan Keynes.
- b. Upah Minimum Regional (UMR) tidak berpengaruh signifikan negatif terhadap Penyerapan Tenaga Kerja (PTK). Hal ini menunjukkan bahwa UMR belum memberikan pengaruh yang nyata terhadap PTK di Pulau Sumatera diakibatkan karena Pulau Sumatera memiliki jumlah penduduk yang sangat besar dengan lapangan pekerjaan yang terbatas dan persaingan yang ketat membuat para pemilik usaha menekan biaya produksi termasuk biaya tenaga kerja sehingga tidak sejalan dengan teori Keynes.
- c. Investasi (INV) berpengaruh signifikan positif terhadap Penyerapan Tenaga Kerja (PTK). Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan INV akan meningkatkan PTK di Pulau Sumatera dikarenakan realisasi atas investasi yang dikeluarkan untuk pembangunan perekonomian dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru dari daya beli konsumen atas suatu barang dan jasa, serta sejalan dengan teori yang Keynes.
- d. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh signifikan negatif terhadap Penyerapan Tenaga Kerja (PTK) sehingga tidak sejalan dengan *Okun's Law* dan pendapat Keynes. Hal tersebut menunjukkan bahwa kenaikan PDRB menyebabkan penurunan PTK di Pulau Sumatera dikarenakan PDRB yang tinggi tidak diiringi dengan SDM yang berkualitas serta ketersediaan prasarana dan sarana yang belum memenuhi kebutuhan kualitas pelayanan, serta tingkat ruralisasi di Pulau Sumatera.
- e. Jumlah Unit Usaha (JUJ) berpengaruh signifikan negatif terhadap Penyerapan Tenaga Kerja (PTK). Hal tersebut menunjukkan bahwa kenaikan JUJ menyebabkan penurunan PTK di Pulau Sumatera dikarenakan kebanyakan usaha bergerak meningkatkan mesin dan teknologi sebagai persaingan kualitas produksinya sehingga dilakukan pengurangan tenaga kerja yang ada di Pulau Sumatera sehingga sejalan dengan teori Schumpeter.

Adapun saran yang diberikan diantaranya:

- a. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk menggunakan data penelitian dalam rentang waktu yang lebih panjang dengan objek penelitian yang lebih luas sehingga tidak hanya terfokus pada beberapa wilayah tertentu dalam melakukan penelitian dan memberikan pengaruh yang lebih baik.
- b. Bagi Pemerintah diharapkan dapat mengatasi PTK di Pulau Sumatera dengan menyediakan lapangan kerja baru maupun meningkatkan lapangan pekerjaan yang sudah ada agar seimbang antara jumlah angkatan kerja dengan lapangan kerja dan masalah tenaga kerja dapat segera teratasi.

- c. Pemerintah diharapkan dapat menyempurnakan kebijakan dalam UU Cipta Kerja yang sudah berganti beberapa kali dan terakhir menjadi UU No. 6 Tahun 2023 pada awal tahun kemarin, namun melihat catatan yang dihasilkan dengan UU tersebut perlu adanya pengembangan yang terus dilanjutkan untuk menggunakan tenaga kerja secara menyeluruh dan sejahtera seperti memasukkan formula KHL dalam perhitungan upah.
- d. Pemerintah perlu memaksimalkan seluruh potensi yang ada untuk meningkatkan produktivitas dengan menyempurnakan kebijakan dan implementasi yang sesuai dengan daya dukung lingkungan, serta juga menyeimbangkan pendapatan dengan harga konsumsi untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja

### DAFTAR PUSTAKA

- Adriani, E. (2019). Pengukuran Modal Manusia (Suatu Studi Literatur). *Jurnal Manajemen dan Sains*, 4(1), 4(1), 176-183. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33087/jmas.v4i1.86>
- Alisjahbana, A. S., & Murniningtyas, E. (2018). *Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia: Konsep, Target, dan Strategi Implementasi*. Bandung: Unpad Press.
- Anamathofani, A. L. (2019). Pengaruh Upah Minimum, PDRB, dan Inflasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kota Malang. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*, 7(2), 1-20. <https://doi.org/https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/6052>
- Bank Indonesia. (2022). *Sinergi dan Inovasi Memperkuat Ketahanan dan Kebangkitan Menuju Indonesia Maju*. Bank Indonesia. [https://doi.org/https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/Documents/LPI\\_2022.pdf](https://doi.org/https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/Documents/LPI_2022.pdf)
- Basrowi, Sindi Yuliana, Arief Dian Prayogo, Liana, J. E., Andriansyah, M., & Astridinata, I. K. (2018). Konsep Pengangguran Perspektif Teoritis. *Open Science Framework*, 1-14. Open Science Framework.
- Basuki, A. T., & Lestari, A. I. (2022). Analysis of Factors Affecting Labor Absorption in the Province of the Riau Islands. *Internasional Journal of Science and Research*, 11(3), 321-326. <https://doi.org/https://www.ijsr.net/archive/v11i3/SR22302100644>
- Chomariah, W. I. (2023). Analisa Faktor-Faktor Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri Besar dan Sedang di Kabupaten Gresik. *JEMSI: Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi*, 9(4), 1170-1181. <https://doi.org/https://doi.org/10.35870/jemsi.v9i4.1264>
- Ekawarna, & Muslim, F. (2008). *Pengantar Teori Ekonomi Makro*. Jakarta: Gaung Persada (GP Press). [https://doi.org/https://es.stai-alazharmenganti.ac.id/wp-content/uploads/2022/09/Pengantar-Teori-Ekonomi-Makro-Dr.-Ekawarna-M.Si\\_-Fachruddiansyah-S.Pd\\_-etc.-z-lib.org\\_.pdf](https://doi.org/https://es.stai-alazharmenganti.ac.id/wp-content/uploads/2022/09/Pengantar-Teori-Ekonomi-Makro-Dr.-Ekawarna-M.Si_-Fachruddiansyah-S.Pd_-etc.-z-lib.org_.pdf)
- Elko, M. R. (2022). *Disnakertrans Sumsel Proses Hukum Sembilan Kasus Upah di Bawah Standar*. Antara Kantor Berita Indonesia.

- Firmansah, M. Y. (2019). Analisis Pengaruh PDRB, Upah Minimum Provinsi, dan Investasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Pulau Jawa Tahun 2010-2017. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Brawijaya*, 8(1), 1-10.  
<https://doi.org/https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/6119/5380>
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25 Edisi 9*. Semarang: Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hasmawati, Ilyas, A., & Abdul Rahman. (2021). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Upah Minimum Regional, dan Inflasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kota Makassar dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Intervening. *ICOR: Journal of Regional Economics*, 2(3), 1-18. <https://doi.org/https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/icor/article/view/26892/14504>
- Kementerian PPN/Bappenas. (2019). *Evaluasi Akhir RPJMN 2015-2019*. Bappenas. [https://doi.org/https://perpustakaan.bappenas.go.id/e-library/file\\_upload/koleksi/migrasi-data-publikasi/file/Evaluasi\\_Perencanaan\\_Pembangunan/Evaluasi%20Akhir%20RPJMN%202015-2019.pdf](https://doi.org/https://perpustakaan.bappenas.go.id/e-library/file_upload/koleksi/migrasi-data-publikasi/file/Evaluasi_Perencanaan_Pembangunan/Evaluasi%20Akhir%20RPJMN%202015-2019.pdf)
- Lokanathan V. (2018). *A History of Economic Thought, 10 Edition*. New Delhi: S Chand And Company Limited.
- Lowing, B. D., Rotinsulu, D., & Siwu, H. (2021). Pengaruh PDRB, Tingkat Pengangguran, dan Jumlah Penduduk Terhadap Kemiskinan di Kabupaten Minahasa. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 21(7), 69-80.  
<https://doi.org/https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jbie/issue/view/3126>
- Lube, F., Kalangi, J. B., & Tolosang, K. D. (2021). Analisis Pengaruh Upah Minimum dan PDRB Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kota Bitung. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 21(3), 25-35.  
<https://doi.org/https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jbie/article/view/36096>
- Nurkholis, A. (2018). Teori Pembangunan Sumberdaya Manusia: Human Capital Theory, Human Investment Theory, Human Development Theory, Sustainable Development Theory, People Centered Development Theory. *INA-Rxiv Papers*, 1-16.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.31227/osf.io/8trv7>
- Pusat Pemrograman Dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur PUPR. (2021). *Sikronisasi Program Dan Pembiayaan Pembangunan Jangka Pendek 2018-2020 Keterpaduan Pembangunan Kawasan Dengan Infrastuktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat*. Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.  
[https://doi.org/https://bpiw.pu.go.id/uploads/buku\\_produk/Buku\\_1Sumatera.pdf](https://doi.org/https://bpiw.pu.go.id/uploads/buku_produk/Buku_1Sumatera.pdf)
- Rahmah, A. M., & Juliannisa, I. A. (2022). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Upah Minimum, dan PDRB terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat.

- Jurnal IKRAITH-EKONOMIKA*, 5(3), 246-254.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.37817/ikraith-ekonomika.v5i3.2460>
- Safitri, F. R. (2020). Pengaruh PDRB Industri Pengolahan, UMP, dan Jumlah Unit Usaha Industri Pengolahan Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Industri Pengolahan di Pulau Jawa Tahun 2010-2019. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*, 9(2), 1-9.  
<https://doi.org/https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/7669/6609>
- Santoso, K. N., & Usman, H. (2020). Indeks Komposit Pekerjaan Tidak Layak di Indonesia. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 15(1), 19-32.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.14203/jki.v15i1.493>
- Saputra, H., Asnawi, M., & Widiarsih, D. (2022). Analisis Faktor-Faktor Penyerapan Tenaga Kerja Pada Sektor Industri Manufaktur Besar dan Sedang di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2009-2020. *Economics, Accounting, and Business Journal*, 2(2), 356-365.  
<https://doi.org/https://jom.umri.ac.id/index.php/ecountbis/article/view/262>
- Seran, S. (2023). *Penduduk dan Ketenagakerjaan Versus Pembangunan Ekonomi*. Majalengka: PT. Pusat Literasi Dunia.
- Subri, M. (2012). *Ekonomi Sumber Daya Manusia Dalam Perspektif Pembangunan*. Jakarta: Rajawali Pres.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta Bandung.
- Wahyudi, Priyagus, & Kurniawan, E. (2023). Pengaruh Investasi dan Upah serta Ekspor Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Kalimantan Timur. *Kinerja: Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, 20(1), 46-52.  
<https://doi.org/https://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/KINERJA/article/view/12910>
- Wisnubroto, K. (2023, Desember 7). Kawasan Ekonomi Khusus Serap Puluhan Ribuan Tenaga Kerja. *Editorial*. <https://indonesia.go.id/kategori/editorial/7816/kawasan-ekonomi-khusus-serap-puluhan-ribu-tenaga-kerja?lang=1>
- Wulansari, R. A., Imaningsih, N., & Wijaya, R. S. (2021). Pengaruh Modal, Jumlah Unit Usaha, Nilai Investasi, dan Upah Minimum terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Tuban. *Equilibrium: Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi*, 10(2), 137-145.  
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.35906/je001.v10i2.803>
- Yulistiyono, A., Kurniawati, E., Kustiawan, D., Sari, D. H., Marlina, L., Saefullah, H. E., . . . Rachmawati, E. (2021). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Insania.